

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia perkawinan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang tidak bisa memahami hakekat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah-tangga. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.<sup>1</sup> Diskursus tentang pernikahan dini sebenarnya bukan hal baru untuk diperbincangkan. Masalah ini sudah sering diangkat sebagai topik utama di berbagai diskusi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah, "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No.1, (April, 2016), hlm. 34

<sup>2</sup> Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam," *de Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No.2, (Desember, 2011), hlm. 125

Kenyataan tentang maraknya perkawinan karena usia yang terlalu muda ini terjadi di daerah Selo, Boyolali. Di Desa Jrakah dan Klakah, Kecamatan Selo, Boyolali yang terletak di lereng Merbabu. Dusun-dusun terpencil di dua desa itu dikenal dengan tradisi pernikahan dini atau nikah muda. Gadis-gadis di lereng gunung itu selepas lulus SD maupun SMP lebih memilih membangun mahligai pernikahan.<sup>3</sup>

Seperti, di rumah Sargino, 34, warga Desa Klakah, pada Kamis 26 Januari 2017, dia menggelar pernikahan putri semata wayangnya yang masih berusia 14 tahun, Anaknya secara resmi telah dipersunting seorang pria dari desa sebelah. Sebenarnya sempat dilarang oleh petugas KUA karena umurnya belum cukup. Sargino dengan dibantu sejumlah kerabatnya pun mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama (PA). Toh, anaknya juga tak keberatan menikah dini. Dalam salinan surat dispensasi, hakim PA mengabulkan permohonan keluarga karena sejumlah hal. Selain alasan agar tak terjerumus ke perbuatan yang dilarang agama, calon suami dianggap mampu memberi nafkah karena telah bekerja sebagai penambang pasir.<sup>4</sup>

Berdasarkan data yang dilansir KUA Selo, dari 221 perempuan yang menikah, 99 perempuan di antara mereka berusia di bawah 19 tahun. Jrakah dan Klakah adalah desa terbanyak dalam hal pernikahan muda. Menurut Suwanto, Kepala KUA Selo, bukan hal yang mudah mengubah tradisi

---

<sup>3</sup> Solopos.com, Jumat 10 Februari 2017 09:00 WIB, *Tradisi Nikah Muda Gadis-Gadis Lereng Merbabu*, dalam <http://www.m.solopos.com>, diunduh Kamis, 8 Maret 2018 pukul 10:10

<sup>4</sup> *Ibid.*

pernikahan dini di Selo dan daerah-daerah lainnya di lereng Merbabu. Faktor pendidikan adalah masalah utama.<sup>5</sup>

Akibat maraknya nikah muda di Selo, membuat para kepala desa (kades) di wilayah Kecamatan Selo, Boyolali sepakat untuk tidak menghadiri hajatan pernikahan dimana mempelainya masih di bawah umur. Sikap tersebut sebagai upaya mengurangi tingginya angka pernikahan dini di Boyolali, khususnya di wilayah lereng Gunung Merapi-Merbabu. Menurut salah satu perkumpulan yang diadakan pemerintah desa bekerja sama dengan sejumlah elemen masyarakat peduli anak dan perempuan Boyolali, mencuat fakta tentang salah satu faktor maraknya pernikahan dini adalah karena paksaan orang tua. Anak-anak akhirnya tak punya pilihan lain selain patuh kemauan orang tua.<sup>6</sup>

Selain itu, Kepala Desa Samiran, Marjuki. Dia secara tegas mengancam tidak akan mendatangi hajatan pernikahan untuk memberikan sambutan di acara tersebut, padahal ini tak tercatat sah di KUA. Sularsih, Kades Senden, juga mengatakan pernikahan usia anak sangat merugikan perempuan karena banyak hak-hak mereka terampas. Perempuan, tidak mendapat perlindungan hak ketika suaminya lalai atau meninggalkannya.<sup>7</sup>

Kerugian lainnya juga dirasakan anak hasil pernikahan tersebut. Anak-anak akan kesulitan mendapatkan dokumen kelahiran dan surat-surat penting seperti kartu keluarga, KTP, dan lain-lain. Akibat kesulitan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Solopos.com, Senin 27 Februari 2017 16:40 WIB, *Kades di Selo Boyolali Tolak Hadiri Hajatan Pernikahan Dini*, dalam <http://www.m.solopos.com>, diunduh Kamis, 8 Maret 2018 pukul 10:10

<sup>7</sup> *Ibid.*

dokumen ini juga akan menyulitkan proses pembagian hak atas warisan dari orang tuanya.<sup>8</sup>

Untuk membentuk keluarga sesuai dengan syariat, Negara memberi batas usia nikah. Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa demi untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Dari pasal tersebut, apabila dikaitkan pada suatu gejala sosial yang hadir ditengah-tengah masyarakat khususnya yang terjadi di Kecamatan Selo Boyolali merupakan tradisi yang marak di daerah tersebut yang tidak bersesuaian dengan UU Perkawinan.

Praktek pernikahan dini sering dipengaruhi oleh tradisi lokal. Sekalipun ada ketetapan undang-undang yang melarang pernikahan dini, ternyata ada juga fasilitas dispensasi. Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama sering memberi dispensasi jika mempelai wanita ternyata masih di bawah umur. Undang Undang Perkawinan dari tahun 1974 juga tidak tegas melarang praktek itu. Pernikahan usia dini memberi resiko yang lebih besar pada remaja perempuan khususnya pada aspek kesehatan reproduksinya. Hal yang perlu mendapat perhatian dalam pernikahan dini adalah resiko

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

yang terjadi pada anak yang dilahirkan dan juga sumbangan peningkatan angka kematian pada ibu dan bayi serta kerugian lain yang diderita oleh perempuan yang menikah di usia muda. Pernikahan usia dini juga akan berimplikasi pada keterbelakangan pengetahuan akibat terhambatnya proses pendidikan disebabkan pernikahan tersebut, selain itu turut pula dipengaruhi aspek sosial budaya masyarakat.<sup>10</sup> Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul **“Pencegahan Tradisi Nikah Muda sebagai Upaya Perlindungan Anak dan Perempuan (Studi Kasus di Kecamatan Selo Boyolali)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam melakukan pengkajian terhadap permasalahan yang dibahas lebih lanjut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana data pernikahan muda pada tahun 2016 dan 2017 di Kecamatan Selo Boyolali?
2. Bagaimana upaya pencegahan tradisi nikah muda oleh pemerintah desa sebagai wujud perlindungan anak dan perempuan di Kecamatan Selo Boyolali?
3. Bagaimana efektifitas kebijakan pencegahan tradisi nikah muda oleh pemerintah desa sebagai upaya perlindungan anak dan perempuan di Kecamatan Selo Boyolali?

---

<sup>10</sup> Syarifah Salmah, “Pernikahan Dini Ditinjau dari Sudut Pandang Sosial dan Pendidikan,” *Jurnal Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, Vol. 04, No.7, (Januari-Juni, 2016), hlm. 37

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui data pernikahan muda pada tahun 2016 dan 2017 di Kecamatan Selo Boyolali.
2. Untuk menjelaskan pencegahan tradisi nikah muda oleh pemerintah desa sebagai upaya perlindungan anak dan perempuan di Kecamatan Selo Boyolali.
3. Untuk mengetahui efektifitas kebijakan pencegahan tradisi pernikahan muda oleh pemerintah desa sebagai upaya perlindungan anak dan perempuan di Kecamatan Selo Boyolali.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai tradisi nikah muda yang marak terjadi di Kecamatan Selo Boyolali, khususnya ditinjau berdasarkan aspek hukum perdata dalam UU Perkawinan maupun UU Perlindungan Anak.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini dapat memberikan

wawasan dan sumbangan pemikiran terhadap sistem perundang-undangan yang ada saat ini, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan tradisi nikah muda. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dikeluarkan kebijakan di Kecamatan Selo Boyolali dalam mengantisipasi tradisi nikah muda dalam mengurangi tingginya angka pernikahan dini di Boyolali.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Nikah diartikan dengan aqad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan kata nakaha atau zawaja. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara social. Sementara itu secara mental atau rohani mereka yang telah menikah lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya. Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan.<sup>11</sup> Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Maka dari itu, tujuan pada pernikahan dalam agama ialah selain untuk mendapatkan keturunan juga untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan

---

<sup>11</sup> Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah, *Op. Cit.*, hlm. 34

hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>12</sup>

Namun di beberapa daerah di Indonesia, khususnya yang marak terjadi di Kecamatan Selo, Boyolali, masih sering dijumpai perkawinan anak-anak atau perkawinan di bawah umur, yang tidak sesuai dengan hukum positif yaitu Undang –Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>13</sup>

Mengenai batas umur perkawinan, hukum adat tidak mengaturnya. Sedangkan UU Perkawinan mengatur dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Berdasarkan pasal tersebut sudah jelas bahwa seseorang dapat melangsungkan perkawinan apabila sudah mencapai batas umur yang sudah ditentukan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 35

<sup>13</sup> Loresta C. dan Rama P., “Perkawinan di Bawah Umur dalam Hukum Adat Bali Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,” *Jurnal Ilmiah*, Vol. III., No.II, (Oktober, 2015), hlm. 36



Pernikahan dini apabila dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan, antara lain: (a) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *“Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun”* (Pasal 7 ayat 1). *“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya”* (Pasal 6 ayat 2), (b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 26 ayat 1) *“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, (c) Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Amanat undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi anak agar tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.*

Terjadinya pernikahan dini antara lain disebabkan faktor ekonomi dan sosial-budaya. Kondisi ekonomi yang kurang baik atau beban ekonomi yang berat karena anggota keluarganya banyak, menyebabkan seorang anak tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan. Faktor sosial budaya juga memiliki peranan yang sangat besar untuk mendorong terjadinya pernikahan dini, karena ini adalah faktor pendorong tunggal yang tidak terkait dengan faktor ekonomi. Faktor sosial dimaksud adalah adanya praktik perbedaan perlakuan secara ekstrem antara anak laki-laki dan perempuan, adanya gabungan antara nilai-nilai sosial dan kesulitan ekonomi, adanya anggapan-anggapan tertentu tentang nilai keperawanan, desakan dari pihak orang

tua.<sup>14</sup> Berkaitan dengan tradisi nikah muda yang marak terjadi Kecamatan Selo, Boyolali, maka penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan tradisi nikah muda berdasarkan perspektif UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan mengkaji pencegahan tradisi nikah muda oleh pemerintah desa sebagai upaya perlindungan anak dan perempuan di Kecamatan Selo Boyolali.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. pendekatan yuridis adalah melihat atau memandang suatu hal yang ada dari aspek atau segi hukum, sedangkan sosiologis adalah segala sesuatu yang ada dan realita yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan cara pandang dari kacamata hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat yang dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Yaitu terkait dengan pencegahan tradisi nikah muda sebagai upaya perlindungan anak dan perempuan (studi kasus di kecamatan selo boyolali).

### **2. Jenis Penelitian**

---

<sup>14</sup> Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, "Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)," *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. III, No.1, (Januari, 2012), hlm. 88

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif<sup>15</sup>. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.<sup>16</sup> Sehingga dapat diperoleh analisa dan fakta secara cermat, teliti, dan jelas tentang terkait dengan pencegahan tradisi nikah muda sebagai upaya perlindungan anak dan perempuan (studi kasus di Kecamatan Selo Boyolali).

### **3. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kecamatan Selo Boyolali. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data di lokasi tersebut memungkinkan untuk dilakukan penelitian yang berkaitan dengan pencegahan tradisi nikah muda sebagai upaya perlindungan anak dan perempuan (studi kasus di Kecamatan Selo Boyolali).

### **4. Jenis Data**

Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

#### **a. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian dan

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 10

<sup>16</sup>Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 23

hasil wawancara dengan kepala desa atau pemerintah desa di Kecamatan Selo Boyolali dan warga Selo yang melakukan nikah muda.

b. Data Sekunder

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan hukum sekunder.<sup>17</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu norma, kaidah dasar, dan peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan, antarlain:

- 1) KUHPdata,
- 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,
- 3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen

---

<sup>17</sup>Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2015, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 8

resmi, yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa literatur-literatur dan jurnal yang berkaitan dengan pencegahan tradisi nikah muda sebagai upaya perlindungan anak dan perempuan (studi kasus Kecamatan di Selo Boyolali).

## **5. Metode Pengumpulan Data**

### **a. Setudi lapangan**

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data primer, Setudi lapangan di lakukan dendan teknik wawancara dengan pemerintah desa atau kepala desa di Kecamatan Selo, Boyolali, terkait dengan pencegahan tradisi nikah muda sebagai upaya perlindungan anak dan perempuan (studi kasus di Kecamatan Selo Boyolali).

### **b. Setudi Kepustakaan**

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan untuk menentukan data sekunder, dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan, sedangkan alat yang dipergunakan adalah studi dokumen, yaitu studi dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, dan semua peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian.

## **6. Metode Analisis Data**

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan

menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.<sup>18</sup> Proses analisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan berkaitan dengan pencegahan tradisi nikah muda sebagai upaya perlindungan anak dan perempuan (studi kasus Kecamatan Selo di Boyolali).

#### **G. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan
  - 1. Pengertian Perkawinan
  - 2. Tujuan Perkawinan
  - 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

---

<sup>18</sup>Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hal. 242

## B. Tinjauan Umum tentang Tradisi Nikah Muda

1. Pengertian Tradisi Nikah Muda
2. Faktor-Faktor Terjadinya Nikah Muda
3. Nikah Muda dalam Perspektif UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak
4. Permasalahan dan Dampak Tradisi Nikah Muda

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Keadaan data pernikahan muda pada tahun 2016 dan 2017 di Kecamatan Selo Boyolali
- B. Pencegahan tradisi nikah muda oleh pemerintah desa sebagai upaya perlindungan anak dan perempuan di Kecamatan Selo Boyolali
- C. Efektifitas kebijakan pencegahan tradisi nikah muda oleh pemerintah desa sebagai upaya perlindungan anak dan perempuan di Kecamatan Selo Boyolali

## BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## DAFTAR PUSTAKA